



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

## PENGEMBANGAN ETIKA DAN MORAL BANGSA

Dr. H. Marzuki Alie  
KETUA DPR-RI

Disampaikan Pada Sarasehan Nasional Pendidikan Budaya Politik Nasional  
Berlandaskan Etika dan Moral Bangsa  
Pekanbaru, 19 Juni 2010

1

### PENGERTIAN ETIKA DAN MORAL BANGSA:

"the discipline which can act as the performance index or reference for our control system".

**ETIKA** berarti memberikan semacam **batasan** maupun **standar** yang akan mengatur **pergaulan manusia** didalam kelompok sosialnya. Atau pengertian khusus, etika ini merupakan aturan tertulis yang secara **sistematis** dibuat berdasarkan **prinsip-prinsip moral** yang ada; dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk **mengontrol** segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang.

**ETIKA** adalah refleksi dari "**self control**", karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial itu sendiri.

2

**MORAL** lebih mengacu pada **baik-buruknya manusia** sebagai manusia, menuntun manusia bagaimana seharusnya ia hidup, atau apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Dalam kehidupan sosial, semua masyarakat mempunyai aturan moral yang membolehkan atau melarang perbuatan tertentu. Tata kelakuan itu harus diikuti oleh masyarakat dan menimbulkan hukuman bagi pelanggarnya, sebaliknya **perilaku ideal** akan mendapat **reward** sepadan.

**FUNGSI ETIKA** adalah untuk membina kehidupan yang baik berdasarkan nilai-nilai moral tertentu.

Etika dan moral saling berkait;

**Etika dan Moral** dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dapat digali dari dasar negara Pancasila yang memancarkan nilai-nilai moral dan etika yang harus ditumbuhkembangkan dan diimplementasikan oleh setiap warga negara.

**Etika dan moral** dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia digali dari dasar negara **Pancasila** yang harus ditumbuhkembangkan dan diimplementasikan oleh setiap individu warga negara Indonesia.

**Etika dan moral** berbangsa dan bernegara dianggap sebagai etika terapan, karena aturan normatif yang bersifat umum, diterapkan secara khusus sesuai dengan kekhususan dan kekhasan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai etika khusus, **etika dan moral** berbangsa merupakan kontekstualisasi aturan moral umum dalam bidang dan situasi konkret.

**ETIKA dan MORAL** berbangsa terdiri dari tiga, yaitu:

- [1]. **Etika dan moral Individual** yang lebih menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri
- [2]. **Etika dan moral sosial** yang mengacu pada kewajiban dan hak, sikap dan pola perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam interaksinya dengan sesamanya.
- [3]. **Etika dan moral Lingkungan Hidup** yang berhubungan antara manusia, makhluk individu maupun sebagai kelompok, dengan lingkungan alam, dan hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, dan berdampak pada lingkungan hidup secara keseluruhan.

5

**Payung Hukum Etika dan moral dalam kehidupan berbangsa:**

Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2001 tentang Etika dan Perkembangan Demokrasi Bangsa, lahir karena:

- ✘ Lemahnya pemahaman terhadap etika berbangsa, bernegara dan beragama.
- ✘ Terjadinya krisis multidimensi yang memunculkan ancaman yang serius terhadap persatuan bangsa dan kemunduran pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang ditandai adanya konflik sosial, berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah, dan pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan.

6

**Isi TAP MPR MPR RI NO. VI/MPR/2001 :**

- 1. Etika Sosial dan Budaya** yang bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, memahami, menghormati, mencintai, dan saling menolong di antara sesama manusia.
- 2. Etika Politik dan Pemerintahan** dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan bersih, efisien dan efektif, menumbuhkan suasana politik yang demokratis bercirikan keterbukaan, tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.

7

- 3. Etika Ekonomi dan Bisnis;** agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis, baik oleh perseorangan, instansi, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas yang berciri persaingan yang jujur, adil, mendorong berkembangnya etos kerja, daya tahan dan kemampuan bersaing, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil.
- 4. Etika Penegakkan Hukum yang Berkeadilan,** dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama. Hal ini dapat diwujudkan dengan ketaatan kepada hukum dan peraturan yang berpihak kepada keadilan.

8

**5. Etika Keilmuan;** dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya.

**6. Etika Lingkungan;** menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup, serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

9

## MAKNA DAN PEMAHAMAN ETIKA DAN MORAL BANGSA

**[1]** Pemahaman terhadap etika dan moral bangsa dewasa ini penting, mengingat adanya **krisis sosial, budaya, dan moral**. Terutama dapat disaksikan dalam berbagai bentuk disorientasi dan dislokasi masyarakat. **Seperti:**

- × **disintegrasi sosial-politik** yang bersumber pada euforia kebebasan;
- × **lenyapnya kesabaran sosial** dalam menghadapi realitas kehidupan yang semakin sulit sehingga mudah melakukan berbagai tindakan kekerasan dan anarki;
- × **merosotnya penghargaan dan kepatuhan** terhadap hukum, etika, moral, dan kesantunan sosial;
- × semakin meluasnya **penyebaran narkoba** serta **penyakit-penyakit sosial** lain;
- × dan berlanjutnya **konflik dan kekerasan** yang bernuansa politis, etnis, dan agama.

10

- [2]**
- ✘ merupakan **panduan universal** yang merawat cita-cita kehidupan bernegara untuk mencapai tujuan asasinya, yaitu kehidupan yang berjalan di atas nilai-nilai budaya bangsa.
  - ✘ merupakan konsensus, sebagai rujukan berinteraksi dalam seluruh dimensi kehidupan.
  - ✘ setiap sikap dan perilaku di ruang publik, harus mencerminkan nilai-nilai itu, agar cita-cita dan keutuhan masyarakat tetap terjaga.

- [3]** konsepsi dasar moral dan etika sebuah negara, perlu terus mengacu pada **konsensus nilai-nilai yang ada**, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, terutama nilai-nilai mayoritas yang menjadi sebuah keniscayaan dalam mewarnai tata perilaku warga bangsa.

Hal ini akan terjadi, jika politik kekuasaan berjalan di atas landasan demokrasi dan menempatkan rakyat sebagai yang berdaulat, sehingga nilai-nilai yang berkembang di masyarakat tetap berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan.

**[4] Moral dan etika** lahir dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, yang tujuannya adalah menjalin kebersamaan, merawat kesatuan, dan mencapai kehidupan yang tenteram, harmonis, dan sejahtera.

**Moral dan etika** dalam perilaku masyarakat, termasuk dalam politik bernegara adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena menafikkan salah satunya berarti menarik kegiatan politik dari dimensi sosial dan hanya menjadi urusan pribadi.

**Moral dan etika meringkai politik**, agar berjalan konsisten sesuai tujuan asasinya, sehingga tanggung jawab dan kewajiban manusia terhadap negara, terhadap hukum yang berlaku, dan terhadap sesama manusia, dapat ditegakkan.

**Pengembangan etika dan moral bangsa**, memiliki dua pilar utama:

1. Pilar **Pancasila** dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD 1945**)
2. Pilar **persatuan Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.**

## Pilar [1] Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

**Sila pertama Pancasila** memberikan pesan, bahwa **etika dan moral merupakan inti dari setiap agama**, karena berkaitan dengan masalah keyakinan. Setiap pemeluk agama harus menyadari bahwa kaidah-kaidah yang berlaku untuk setiap pribadi adalah mutlak bagi dirinya.

**Sila kedua Pancasila** mengajarkan, bahwa sebagai perorangan maupun anggota masyarakat, wajib **memperhatikan individu maupun kelompok lain** sebagai manusia yang memiliki HAM yang komprehensif. **Semua manusia memiliki hak** sosial, politik, ekonomi, dan budaya, **yang saling melengkapi**, sehingga terbangun citra diri yang manusiawi.

15

**Sila ketiga Pancasila**, menekankan **rasa persatuan**, karena membentuk sebuah bangsa besar dari Sabang sampai Merauke. Rasa persatuan mampu mengikat kekayaan kebhinnekaan dalam kesatuan dan kebersamaan.

**Sila keempat Pancasila**, memberikan dasar-dasar utama bagi **terciptanya konsensus dalam keberagaman**. Konsensus menjadi sebuah **rumus yang mempersatukan**, dan tidak **mempersoalkan, antara minoritas dengan mayoritas** yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti keturunan, agama, dan lain sebagainya.

16



**Sila kelima Pancasila**, menempatkan **keadilan** sebagai sebuah elemen penting untuk stabilitas dan pertahanan sebuah negara.

**UUD 1945**, sesuai dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan adalah landasan hukum di dalam kita bernegara. **UUD 1945** menjadi pedoman dan landasan bagi terbentuknya berbagai peraturan perundangan di Indonesia.

## **Pilar [2] Persatuan Indonesia Dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika**

Pilar ini, menunjukkan adanya kesadaran bahwa persatuan perlu dibangun diatas kemajemukan suku bangsa dan budaya, yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Kesadaran dan semangat persatuan dalam bingkai kebangsaan bersama menjadi landasan politik bernegara, dan menjadi acuan bersama.

Sebagai sebuah bangsa yang plural dan heterogen, semua upaya harus dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan tanpa mengorbankan keberagaman.

### KESIMPULAN

- [1] **Etika dan moral bangsa**, tidak hanya perlu menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan, tapi juga menjadi dasar sikap dan perilaku warganya sehingga bangunan negara bangsa (*nation state*) berdiri kokoh dan integral.
- [2] **Etika dan moral bangsa** bukan sekedar konsepsi, tetapi harus terimplementasi dalam sikap dan perilaku politik yang berorientasi pada kepentingan seluruh masyarakat tanpa terkecuali, bukan kepentingan primordial suku bangsa tertentu atau etnik dan budaya tertentu.
- [3] **Etika dan moral bangsa** dalam kerangka persatuan dan bhinneka tunggal ika menjadi dasar pertimbangan yang bijaksana yang dapat mengatasi berbagai perbedaan yang senantiasa muncul dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- [4] Bangunan Indonesia Baru yang kita cita-citakan adalah sebuah "**masyarakat multikultural Indonesia**".

19

**Multikulturalisme** adalah sebuah ideologi dan sebuah alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya.

**Multikulturalisme** mengandung perspektif dalam kerangka membangun konsep sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan yang mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan budaya (baik ras, suku, etnis, maupun agama).

**Multikulturalisme** memberi pemahaman bahwa bangsa yang plural dan majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan beragam budaya, didukung oleh **moral dan etika**.

20

## PENUTUP

---

**Etika dan moral bangsa**, tidak akan mungkin terselesaikan hanya dengan diskusi dalam sarasehan yang waktunya sangat terbatas.

Sarasehan diharapkan dapat **merumuskan sesuatu yang mendasar** dan dapat memecahkan permasalahan etika dan moral kebangsaan Indonesia.

Paling tidak, dapat membuka wacana baru untuk lebih mengkonkretkan persoalan, **bukan mempersoalkan persoalan**, melainkan mencari jalan keluar untuk menjawab berbagai persoalan.

21

---

# TERIMA KASIH

22